



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Telah Reviuw	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.1.1. Penjelasan Umum	I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I - 2
b. Data Geografis Wilayah	I - 4
c. Jumlah Penduduk	I - 9
d. Jumlah Kabupaten/Kota	I - 10
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I - 12
f. Rincian Aparatur Sipil Negara	I - 14
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	I - 15
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pedoman Umum	I - 20
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 25
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	I - 26
b. Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025	I - 30
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026	I - 33
d. Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I - 39
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 61
a. Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 61



b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..	I - 61
c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Standar Pelayanan Minimal (SPM)	I - 62
BAB II CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	II - 1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II - 1
a. Indeks Pembangunan Manusia (PMI)	II - 1
b. Angka Kemiskinan	II - 2
c. Angka Pengangguran	II - 3
d. Pertumbuhan Ekonomi	II - 4
e. PDRB Perkapita	II - 5
f. Ketimpangan Pendapatan	II - 5
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II - 7
a. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II - 7
b. Indikator Kinerja Kunci Penunjang	II - 43
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II - 50
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III - 1
3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III - 1
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi..	III - 1
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III - 1
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV - 1
4.1. Urusan Pendidikan	IV - 1
4.2. Urusan Kesehatan	IV - 3
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	IV - 5
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	IV - 10
4.5. Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja).....	IV - 14
4.6. Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana)....	IV - 16
4.7. Urusan Sosial	IV - 18
4.8. Program dan Kegiatan	IV - 20
BAB V PENUTUP	V - 1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1. Rekapitulasi Jumlah Penduduk p e r Kabupaten/ Kota se NTT Tahun 2024	I - 9
Tabel.1.2. Jumlah Desa, Kelurahan & Kecamatan Menurut Kab/Kotadi Provinsi NTT Tahun 2024 Berdasarkan Keprmendagri Nomor 100.1.1.6177 Tahun 2024	I - 10
Tabel 1.3 Daftar Usulan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa	I - 11
Tabel.1.4. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I - 12
Tabel.1.5. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	I - 14
Tabel.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer.....	I - 16
Tabel.1.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024	I - 18
Tabel.1.8. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024	I - 19
Tabel.1.9. Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang, Fungsi Pengawasan dan Funsii Pedoman Umum Penyusunan LPPD	I - 20
Tabel.1.10 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	I - 26
Tabel.2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi NTT Tahun 2023 – 2024	II - 1



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar.1.1. Peta Nusa Tenggara Timur	I - 5
Gambar.1.2. Peta Morfologi Nusa Tenggara Timur.....	I - 6
Gambar.1.3. Peta Formasi Geologi Nusa Tenggara Timur.....	I - 7
Gambar.1.4. Peta Hidrologi Nusa Tenggara Timur.....	I - 8
Gambar.1.5. Peta Analisis Curah Hujan Nusa Tenggara Timur.....	I - 8



PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas restu, penyertaan dan penyelenggaraan-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pula pada peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain bersifat informatif, LPPD Tahun 2024 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyampaian LPPD ini merupakan wujud tanggungjawab dan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini didasarkan pada pedoman umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun tidak semua indikator kinerja kunci maupun Standar Pelayanan Minimal dapat dilaporkan. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 – 2026 yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2024 ini juga diwarnai dengan transisi kepemimpinan dari Pj Gubernur 2023-2024 yang berakhir masa jabatannya pada Bulan September 2024 dan digantikan oleh Penjabat Gubernur. Untuk itu, Pemerintah Provinsi



Nusa Tenggara Timur berharap agar Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan hal ini dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa berkomitmen, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa pencapaian pembangunan di Nusa Tenggara Timur saat ini tidak terlepas dari perhatian, peran aktif dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan terutama dukungan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala perhatian dan dukungannya selama ini, sekaligus menaruh harapan yang besar untuk dukungan dan kerjasamanya di masa-masa mendatang.

Akhirnya perkenalkan kami menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui dokumen ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan daerah dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, diantaranya Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun semua pihak yang telah proaktif dalam mendukung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 disampaikan untuk menjadi pemeriksaan, dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kupang, 18 Maret 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA